

Pengaruh Tingkat Pendidikan, Upah Minimum, dan Pekerja Informal Non-Pertanian terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia

Hadira Thumaninah Jibril¹, Muhammad Jibril Tajibu², Kasnaeny Karim³,

¹ Program Studi Ekonomi dan Pembangunan Universitas Tadulako, Palu

² Program Studi Ilmu Ekonomi Universitas Hasanuddin, Makassar

³ Program Studi Manajemen Universitas Muslim Indonesia, Makassar

Abstract

This study aims to examine the influence of average education level, provincial minimum wage, and the percentage of non-agricultural informal workers on the open unemployment rate (OUR) in Indonesia. Secondary data were obtained from the official 2024 publications of Statistics Indonesia (BPS) and analyzed using multiple linear regression. The findings reveal that only the education level has a significant effect on the OUR, while the minimum wage and informal employment variables do not show significant influence. These results underscore the importance of educational reform and the need for more adaptive employment policy planning to respond to labor market dynamics. bstraks dalam bahasa inggis juga diperlukan sebagaimana yang diuraikan sebelumnya.

Keywords: education level, minimum wage, informal sector, unemployment, labor market.

Copyright (c) 2025 Hadira Thumaninah Jibril

✉ Corresponding author :

Email Address : hadirajibril@untad.ac.id

PENDAHULUAN

Salah satu indikator utama yang digunakan untuk mengevaluasi situasi ketenagakerjaan suatu negara adalah pengangguran. Seseorang yang bekerja tetapi saat ini tidak memiliki pekerjaan tetapi sedang aktif mencari pekerjaan dikatakan menganggur. Todaro dan Smith (2015) berpendapat bahwa pengangguran di negara berkembang memiliki karakteristik yang berbeda jika dibandingkan dengan negara maju, terutama karena banyaknya sektor informal dan setengah pengangguran. Bentuk pengangguran yang umum di negara berkembang adalah pengangguran terselubung, yang didefinisikan sebagai keadaan di mana seseorang terlibat dalam pekerjaan berbayar tetapi menunjukkan tingkat produktivitas yang menurun atau bekerja di bawah kapasitas optimalnya. (Jibril, dkk, 2022)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tetap menjadi masalah meskipun ekonomi Indonesia sedang berkembang. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan TPT Indonesia pada Februari 2022 sebesar 5,83 persen atau sebanyak 8,4 juta orang masih menganggur. Hal ini menunjukkan bahwa tenaga kerja belum terserap secara optimal dalam rangka ekspansi ekonomi.

Besarnya sektor informal, terutama di luar sektor pertanian, menjadi salah satu faktor penyebab tingginya angka pengangguran. Usaha mikro dan kecil, serta pekerjaan tanpa jaminan sosial atau perlindungan hukum, biasanya termasuk dalam sektor informal. Menurut ILO (2018), mayoritas pekerja di negara-negara berkembang bekerja di sektor informal, yang biasanya ditandai dengan upah rendah, kondisi kerja yang tidak menguntungkan, dan pendapatan yang tidak stabil. Sektor informal non-pertanian di Indonesia sering kali menjadi "penampung" tenaga kerja yang tidak dapat diserap oleh sektor formal, tetapi juga menjadi cerminan ketidakteraturan struktur ketenagakerjaan di Indonesia.

Studi IMF (2020) menemukan bahwa pertumbuhan sektor informal memiliki korelasi negatif dengan efisiensi pasar tenaga kerja dan efektivitas kebijakan ketenagakerjaan. Sektor informal bertindak sebagai "peredam guncangan", tetapi juga mengurangi penyerapan tenaga kerja formal dan meningkatkan volatilitas pengangguran. Temuan ini konsisten dengan penelitian IMF (2023), yang menunjukkan bahwa meskipun sektor informal membantu mengurangi peningkatan pengangguran selama kemerosotan ekonomi, hampir tidak ada transisi kembali ke pekerjaan formal selama pemulihan, yang memperburuk masalah pengangguran struktural. Hasil-hasil ini mendukung kesimpulan Wondimu & Birru (2020) bahwa keberadaan sektor informal non-pertanian secara tidak langsung dapat meningkatkan Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia.

Mayoritas pekerja di sektor nonpertanian memiliki keterampilan yang terbatas dan tidak memiliki akses terhadap jaminan sosial dan perlindungan hukum. Akibatnya, mereka lebih rentan terhadap guncangan ekonomi dan merasa lebih sulit untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Penelitian oleh Wondimu dan Birru (2020) menggunakan pendekatan Multiple Indicators Multiple Causes (MIMIC) untuk menunjukkan bahwa keberadaan sektor informal berdampak positif terhadap ukuran ekonomi informal, yang berkontribusi terhadap tingginya tingkat pengangguran, khususnya di luar sektor pertanian di Ethiopia. Temuan ini memperkuat argumen bahwa sektor informal, meskipun berperan dalam menyediakan lapangan kerja, justru dapat menjadi indikator ketidakteraturan struktural dalam sistem ketenagakerjaan formal.

Tingginya angka pengangguran juga diduga disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan dan perbedaan Upah Minimum Provinsi (UMP) antar daerah. Menurunkan angka pengangguran sangat bergantung pada mutu dan penerapan pendidikan terhadap tuntutan pasar tenaga kerja. Menurut teori Human Capital Becker dari tahun 1993, investasi dalam pendidikan akan meningkatkan peluang karier dan produktivitas individu. Namun, realitas yang ada di Indonesia menunjukkan adanya kesenjangan antara permintaan industri dan produksi pendidikan. Menurut Paramitasari dkk. (2024), distribusi ekonomi regional berdampak pada ketidaksesuaian lapangan kerja Indonesia yang terus tinggi, khususnya bagi lulusan vokasi. Hal ini menegaskan perlunya kebijakan pendidikan yang dapat disesuaikan untuk memenuhi tuntutan pasar tenaga kerja. Sementara itu, variasi UMP berdampak pada mobilitas tenaga kerja dan distribusi kesempatan kerja antar wilayah

Menurut penelitian Sari dan Pangestuty (2022), angka pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur sangat dipengaruhi oleh jenjang pendidikan. Menariknya, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa peningkatan jenjang pendidikan justru diiringi dengan peningkatan pengangguran terbuka. Hal ini disebabkan oleh ketidaksesuaian antara keterampilan lulusan dengan tuntutan dunia kerja serta tingginya ekspektasi terhadap gaji lulusan pendidikan tinggi. Hal ini menegaskan pentingnya kebijakan pendidikan yang mengutamakan kualitas, kuantitas, dan relevansi pasar tenaga kerja.

Di sisi lain, perbedaan UMP dapat memengaruhi keinginan pekerja dalam mencari pekerjaan di berbagai industri formal dan juga berkontribusi pada distribusi peluang kerja antar wilayah. Kebijakan upah minimum memiliki dua sisi. Di satu sisi, upah minimum dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja. Menurut Bruttel (2019), setelah penerapan upah minimum pertama di Jerman, tidak terjadi pemutusan hubungan kerja massal, namun perusahaan merespons dengan mengurangi jam kerja terutama pada pekerjaan paruh waktu.

Di sisi lain, jika upah minimum ditetapkan terlalu tinggi, hal ini dapat menurunkan permintaan tenaga kerja khususnya pekerja berpendidikan rendah dan tanpa pengalaman. Penelitian oleh Simbala, Walewangko, & Niode (2024) di Indonesia menemukan bahwa kenaikan upah minimum provinsi berpengaruh positif terhadap tingkat pengangguran di wilayah Bolaang Mongondow Raya, karena biaya tenaga kerja meningkat secara tidak seimbang.

Perbedaan upah minimum antar wilayah juga bisa menimbulkan ketimpangan distribusi tenaga kerja. Radityana, Djayastra et al. (2023) dalam studi di Provinsi Bali menyatakan bahwa perbedaan upah minimum provinsi menyebabkan mobilitas tenaga kerja ke daerah dengan upah lebih tinggi, namun ketersediaan lapangan kerja tidak selalu sebanding, sehingga dapat memperparah pengangguran terbuka

Namun, sebagian besar studi fokus pada pengaruh pendidikan dan upah minimum terhadap pengangguran, namun belum banyak yang meneliti secara khusus kontribusi sektor informal non-pertanian terhadap TPT. Keterbatasan ini menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut untuk memahami dinamika sektor informal dalam konteks pengangguran.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memahami sejauh mana faktor pendidikan, kebijakan upah minimum, dan proporsi pekerjaan informal memengaruhi tingkat pengangguran di Indonesia. Dengan menganalisis data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2024, penelitian ini bertujuan untuk memberikan masukan kebijakan yang dapat meningkatkan efektivitas program penanggulangan pengangguran dan memperkuat struktur pasar tenaga kerja di Indonesia.

2. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis deskriptif dan eksplanatif. Pendekatan ini digunakan untuk menjelaskan hubungan antara variabel-variabel yang memengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka, khususnya tingkat pendidikan, Upah Minimum Provinsi, dan proporsi pekerja informal non-pertanian.

Data yang digunakan merupakan data sekunder dari publikasi resmi BPS tahun 2024, dianalisis pada tingkat provinsi.

Variabel Penelitian pada penelitian ini adalah: a) Dependen: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan b) Independen terdiri dari X1 Rata-rata jenjang pendidikan penduduk usia kerja (tahun), X2 Upah Minimum Provinsi (UMP), dan X3 Persentase pekerja informal non-pertanian

Analisis data dilakukan dengan menggunakan regresi linier berganda untuk melihat pengaruh masing-masing variabel independen terhadap TPT. Model regresi yang digunakan dirumuskan sebagai berikut:

$$TPT_i = \beta_0 + \beta_1 \text{Pendidikan}_i + \beta_2 \text{UMP}_i + \beta_3 \text{Informal}_i + \varepsilon_i$$

Keterangan:

TPT_i : Tingkat Pengangguran Terbuka di provinsi ke-i

Pendidikan_i : Rata-rata lama sekolah di provinsi ke-i

UMP_i : Upah Minimum Provinsi ke-i

Informal_i : Persentase pekerja informal non-pertanian di provinsi ke-i

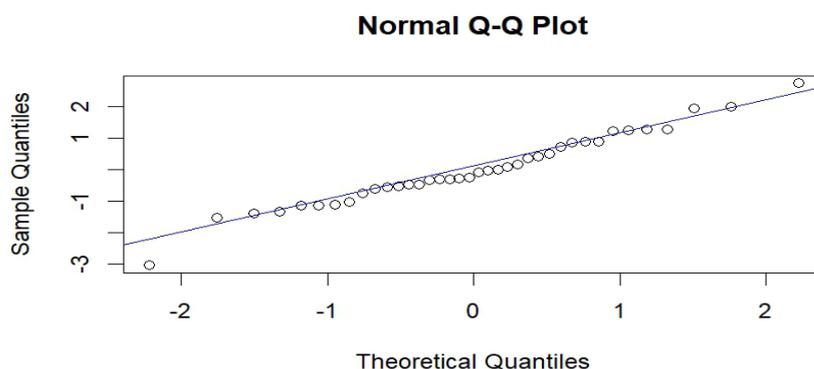
ε : Error term

Hasil dan Pembahasan

Hasil Analisis

Uji Normalitas Data

Sebelum dilakukan analisis regresi berganda, terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik, yang terdiri dari Uji normalitas data, Uji multikolinearitas, dan Uji Heteroskedastisitas untuk memastikan bahwa data sudah layak untuk diuji.



Gambar 1 Plot Q-Q Normalitas Residual

Hasil uji menunjukkan nilai statistik sebesar 0,3055 dengan p-value = 0,8583. Nilai p lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa residual model berdistribusi normal. Dengan demikian, asumsi normalitas dalam regresi linier terpenuhi.

(Intercept)	-8,5366	15,4919	-0,551	0,585
EDU	0,5229*	0,2043	2,560	0,015
INFORMAL	-0,0388	0,0378	-1,025	0,313
InUMP	0,6737	0,9597	0,702	0,487

Keterangan: * menunjukkan signifikansi pada level 5 persen

Hasil ini menunjukkan bahwa hanya variabel Tingkat Pendidikan yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka pada taraf signifikansi 5 persen. Sedangkan variabel Sektor Informal Non Pertanian dan Upah Minimum Provinsi tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan secara statistik.

Koefisien positif dan signifikan pada variabel tingkat pendidikan mengindikasikan bahwa peningkatan rata-rata pendidikan justru diiringi dengan peningkatan tingkat pengangguran terbuka. Hal ini mencerminkan adanya fenomena job mismatch dan ekspektasi upah yang lebih tinggi dari lulusan berpendidikan tinggi. Misalnya, penelitian di Pulau Jawa menunjukkan bahwa pencari kerja dengan pendidikan tinggi cenderung lebih selektif dan menunda menerima pekerjaan karena harapan kompensasi yang lebih tinggi, sehingga secara tidak langsung mempertahankan angka pengangguran tetap tinggi (Riya et al., 2024). Selain itu, meskipun pendidikan berdampak terhadap peningkatan kualitas SDM dan disparitas pendapatan, namun tidak selalu secara langsung menurunkan tingkat pengangguran terbuka. Temuan ini sejalan dengan teori Human Capital oleh Becker (1993), yang menyatakan bahwa manfaat pendidikan akan optimal bila keterampilan yang diperoleh sesuai dengan permintaan tenaga kerja.

Meskipun secara statistik tidak signifikan, variabel pekerja informal nonpertanian memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran terbuka. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Kamelia & Nugraha (2021) yang menunjukkan bahwa meskipun sektor informal di Kecamatan Labang, Bangkalan berperan dalam penyerapan tenaga kerja, namun pengaruhnya terhadap pengangguran terbuka masih sangat kecil karena produktivitasnya yang rendah. Fahri dkk. (2022) juga menunjukkan bahwa meskipun persentase pekerja informal tinggi (sekitar 60 persen), potensi mereka untuk menurunkan pengangguran masih belum kuat karena pendapatan yang tidak menentu dan kurangnya jaminan kerja.

Ketidaksignifikanan ini dapat dijelaskan oleh heterogenitas sektor informal itu sendiri serta ketidakpastian pendapatan dan rendahnya jaminan ketenagakerjaan, sebagaimana diamati Fahri et al. (2022), di mana sektor informal hanya berfungsi sebagai bantalan sosial ekonomi daripada jalur pemutusan pengangguran jangka panjang .

Variabel Upah Minimum Provinsi juga tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka. Meskipun upah minimum secara teori dapat memengaruhi permintaan dan penawaran tenaga kerja, temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan UMP belum secara langsung berdampak terhadap pengangguran terbuka. Hal ini sejalan dengan hasil studi ILO (2018) yang menyebutkan bahwa efektivitas kebijakan upah minimum sangat tergantung pada kepatuhan pengusaha dan pengawasan di lapangan.

SIMPULAN

Hasil temuan menunjukkan bahwa hanya variabel Tingkat Pendidikan yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka pada taraf signifikansi 5 persen. Sedangkan variabel Sektor Informal Non Pertanian dan Upah Minimum Provinsi tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan secara statistik. Secara keseluruhan, temuan studi ini mendukung gagasan bahwa salah satu alasan utama tingginya persentase pengangguran terbuka adalah pendidikan yang tidak sejalan dengan tuntutan pasar tenaga kerja.

Dengan demikian, diperlukan reformasi pada pendidikan yang lebih menekankan keterampilan kerja, meningkatkan pendidikan kejuruan, dan memperkuat kolaborasi antara lembaga akademis dan dunia industri. Selanjutnya diperlukan juga strategi atau kebijakan yang lebih inklusif untuk memasukkan sektor informal ke dalam sistem pekerjaan formal yang terlindungi.

Referensi :

- Becker, G. S. (1993). *Human capital: A theoretical and empirical analysis, with special reference to education* (3rd ed.). University of Chicago Press.
- Bruttel, O. (2019). The effects of the new statutory minimum wage in Germany: A first assessment of the evidence. *Journal for Labour Market Research*, 53(10). <https://doi.org/10.1186/s12651-019-0258-z>
- Fahri Azis Sibagariang, Lournan, M., Rissa, E., & Fitri, K. (2022). Gambaran pekerja informal dan faktor-faktor yang memengaruhinya di Indonesia tahun 2022: Informal Workers and Its Determinants in Indonesia 2022. *Prosiding Semnas Offstat, Politeknik Statistika STIS*. <https://satudata.kemnaker.go.id/prosiding.stis.ac.id/journal.univpancasila.ac.id> (akses gabungan)
- International Monetary Fund. (2020). The informal economy in the post-COVID recovery (IMF Policy Paper No. 2020/030). <https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2020/06/30/The-Informal-Economy-in-the-Post-COVID-Recovery-49534>
- International Monetary Fund. (2023). Informality and inclusive growth in Asia (IMF Working Paper No. 23/20). <https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2023/01/20/Informality-and-Inclusive-Growth-in-Asia-528760>
- Jibri, Hadira Thumaninah, Susilo Susilo, Rachmad Kresna Sakti (2022), Pemodelan tingkat pengangguran di Indonesia dengan random effect spasial autoregression (Sar-Re). *JPPi (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 8(4). <https://doi.org/10.29210/020221721>
- Kamelia, N., & Nugraha, J. (2021). Peran sektor informal dalam penyerapan tenaga kerja di Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan. *Independent: Journal of Economics*, 1(1), 205–221. <https://doi.org/10.26740/independent.v1n1.p205-221>
- Paramitasari, N., Khoirunurrofik, K., Mahi, B. R., & Hartono, D. (2024). Charting vocational education: Impact of agglomeration economies on job-education

mismatch in Indonesia. *Asia Pacific Journal of Regional Science*, 8(2), 461–491.
<https://doi.org/10.1007/s41685-024-00333-x>

Radityana, I. D. G. M., Djayastra, I. K., Danendra, A. A. N. B., & Wisnu, N. (2023). Pengaruh upah minimum, indeks pembangunan manusia dan pengangguran terbuka terhadap jumlah kemiskinan di Provinsi Bali. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Manajemen Indonesia (JKEMI)*, 1(1).

Riya, A. N. D., Ismail, A. W., & Hedayanti, L. (2024). Pengaruh kualitas pendidikan terhadap tingkat pengangguran di Pulau Jawa. *JEMeS: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Sosial*, 7(1), 26–36.
<https://ojs.ejournalunigoro.com/index.php/JEMeS>

Sari, S. A. E., & Pangestuty, F. W. (2022). Analisis pengaruh jumlah penduduk, tingkat pendidikan, dan produk domestik regional bruto terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur tahun 2017–2020. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 1(4), 653–661.
<https://doi.org/10.21776/jdess.2022.01.4.13>

Simbala, M., Walewangko, E. N., & Niode, A. O. (2024). Pengaruh upah minimum provinsi, pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia terhadap jumlah pengangguran di Bolaang Mongondow Raya. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 24(3).

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic development* (12th ed.). Pearson Education Limited.

Wondimu, S. T., & Birru, M. W. (2020). Determinants of informal economy estimation in Ethiopia: Multiple-indicators, multiple-causes (MIMIC) approach. *Copernican Journal of Finance & Accounting*, 9(2), 65–86.
<https://doi.org/10.12775/CJFA.2020.008>